KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rakyat di Rumah Nggak Makan, Mereka ke Luar Negeri Dibayar: Netizen Sentil Kunker DPR ke Ukraina Saat Covid
Tanggal : Selasa, 03 November 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Netizen Sentil Kunker DPR Ke Ukraina Saat Covid

Rakyat Di Rumah Nggak Makan, Mereka Ke Luar Rumah Dibayar

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin memimpin rombongan DPR kunjungan kerja (kunker) ke Ukraina. Selain bertemu dengan Pimpinan Parlemen Ukraina, Azis cs menyempatkan diri jalan-jalan mengelilingi Kota Kiev, Ukraina.

KUNKER Azis cs ini terpantau dari laman Instagram politisi Golkar Bambang_Patijaya yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR. "Perjalanan Muhibah Parlemen ke Ukraina, Bapak Azis Syamsuddin dan rombongan," tulis Bambang. Belakangan, Bambang menghapus nama Azis Syamsuddin dalam caption unggahannya.

Dalam laman Instagramnnya, Bambang menyertakan sejumlah foto saat dirinya di depan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Ukraina, foto bersama Duta Besar Indonesia Yuddy Chrisnandi dan beberapa video saat pelesiran bersama Azis cs.

Di Ukraina, Bambang juga menyertakan foto saat mengelilingi sejumlah kawasan pariwisata di Kyiv, seperti Borobudur mini, Gereja St Andrew dan Patung Motherland.

"Kami lagi di Motherland, semacam *Statue of Liberty* di Ukraine, semacam Monasnya Ukraine. Luar biasa pemandangannya. Kami bersama rombongan parlemen dipimpin Azis Syamsuddin melihat-lihat, dipandu langsung Dubes Indonesia untuk Ukraina, Bapak Yuddy Chrisnandi," jelas Bambang dalam vlognya yang diunggah di laman Instagram miliknya.

Saat dikonfirmasi, Bambang meminta perihal kunker ke kota kelahiran legenda sepak bola AC Milan Andry Shevchenko ini ditanyakan langsung ke Azis Syamsuddin selaku ketua rombongan.

"Soal (kunker) ke Ukraina, sebaiknya langsung ke Pak Azis saja karena beliau pimpinan rombongan," katanya.

Sementara, Azis Syamsuddin mengatakan, kunker tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan pimpinan Parlemen Ukraina ke Senayan tahun lalu.

"Indonesia-Ukraina memiliki hubungan bilateral yang baik dalam hal kerja sama pertahanan yang perlu terus ditingkatkan. Juga dalam ekonomi agar defisit perdagangan dapat segera teratasi," kata Azis.

Azis menuturkan, selain membahas kerja sama ekonomi kedua negara, juga dibahas pemberian visa bebas masuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Ukraina." Visa bebas kunjungan untuk WNI sebagaimana Indonesia membebaskan Visa kepada Ukraina," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Azis juga memuji pelaksanaan Pilkada Serentak di Ukraina pada masa pandemi Covid-19 yang cukup lancar secara nasional di 22 provinsi.

"Suatu keberhasilan yang luar biasa dan menjadi optimisme bagi penyelengaraan Pilkada Serentak di Indonesia pada Desember nanti," kata Azis.

Dia berharap, kehadiran rombongan DPR di Ukraina dapat menjadi momentum penting dalam peningkatan kerja sama antara kedua negara. Dalam situasi ketidakpastian geopolitik global, kedua negara menghadapi tantangan ekonomi tak jauh berbeda.

Dalam pertemuan tersebut, Azis Syamsuddin didampingi oleh Meutya Hafid, Supriansa, Ace Hasan Syadzily, Hetifah Sjaifudian, Puteri Anetta Komarudin, Mukhamad Misbakhun, Bobby Adityo Rizaldi dan Bambang Putrajaya.

Di media sosial, netizen kebanyakan menanggapi miring kunjungan kerja itu. Akun @ragabara menyayangkan, di saat pemerintah menyuruh rakyatnya berdiam diri di rumah, pejabat negara malah ke luar negeri. "Rakyat biasa di rumah = nggak makan. Mereka di rumah/ke luar rumah tetap dibayar," katanya.

Sementara, akun @sobur-62170561 menilai memang sudah kebiasaan pejabat setiap akhir tahun habiskan anggaran. "Akhir tahun habiskan anggaranlah," katanya. Akun @BurangrangMount menilai, perjalanan dinas Aziz cs sebagai sebuah kunker luar biasa. "Hebat, padahal Ukraina lagi panen Covid-19," katanya.

Koordinator Pemantau Kebijakan Eksekutif Legislatif Sugiyanto mempertanyakan substansi kunjungan kerja DPR ke Ukraina. Apalagi kunker di saat pandemi Covid-19 dan ramainya penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

"Sebenarnya masalah kunjungan kerja itu semua sudah diatur, cuma di masa pandemi ini jadi heran juga kok berani sekali. Apalagi saat ini semua orang takut," katanya.

Seharusnya, kata dia, DPR bisa menahan diri melakukan kegiatan di luar negeri kecuali sangat penting.

"Kita ketahui Covid-19 ini dari luar negeri. Nah, kalau dia ke luar negeri ada potensi untuk tertular dan berpotensi menularkan juga kepada yang lain," katanya.

Menurut Sugiyanto, DPR mestinya memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. DPR seharusnya fokus memperhatikan persoalan-persoalan dari beleid ini mulai dari dampak hukumnya, antisipasi gejolak penolakan yang terus-menerus terjadi dan aspek lainnya terutama Covid-19.

"Saya kira harusnya dua hal tersebut yang jadi substansi di DPR, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Covid-19. Tapi rupanya DPR, khususnya Pimpinan DPR malah meninggalkan," katanya, menyayangkan. ■ KAL